BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa;

1. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi karena Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai cerminan dari aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut, serta kemampuan produksi dan tingkat pendapatan suatu masyarakat. Semakin besar produksi masyarakat dalam wilayahnya maka akan semakin meningkatkan produktivitas masyarakatnya sehingga dapat meningkatkan Upah Minimum.
2. Variabel Inflasi berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) dan memiliki koefisien negatif. Semakin tinggi harga produk di pasaran yang berimbas pada adanya kenaikan biaya produksi, jika UMP bertambah, secara tidak langsung menyebabkan harga-harga di pasar ikut naik. Ketika terjadi peningkatan harga-harga barang atau terjadi inflasi akan mengakibatkan nilai upah riil atau nilai upah tenaga kerja menurun, hal tersebut disebabkan karena perusahaan tidak sanggup dalam memberikan upah yang tinggi karena adanya kenaikan harga.
3. Variabel Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) dikarenakan Pulau Jawa memiliki banyak kawasan industri sehingga mempunyai perkembangan perekonomian yang baik dan didukung oleh biaya hidup yang meningkat setiap tahunnya sehingga membuat penawaran pekerja yang meningkat sulit guna menekan upah yang berlaku.

V.2 Saran

V.2.1 Saran Teoritis

1. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang juga dapat mempengaruhi Upah Minimum Provinsi

seperti tingkat harga, produktivitas kerja serta jam kerja buruh/pekerja.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memanfaatkan sampel penelitian yang lebih terperinci dalam suatu wilayah dan data penelitian dalam rentang waktu yang lebih panjang agar bisa diselaraskan dengan keadaan perekonomian daerah sekitar supaya tidak ada permasalahan diantara buruh/pekerja dengan pemilik usaha

V.2.2 Saran Praktis

1. Pemerintah diharapkan mampu memaksimalkan produktivitas tenaga kerja yang bertujuan guna menekan angka pengangguran, salah satunya dengan memberikan pelatihan agar dapat meningkatkan *skill* para pekerja/buruh di Indonesia, selain itu diharapkan pemerintah dapat meningkatkan modal usaha yang beredar di masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkatkan produktivitasnya dan dapat ikut berkontribusi dalam perekonomian.
2. Menurut kebutuhan hidup layak (KHL), Dewan Pengupahan Provinsi menawarkan usulan dalam penentuan upah kepada Gubernur yang kemudian akan disahkan. Komponen KHL tersebut dipergunakan untuk menjadi dasar penetapan UMP yang didasari oleh kebutuhan hidup pekerja lajang atau belum menikah. Hal itu sangat diperlukan dipertimbangkan kembali di mana bukan lagi menurut kebutuhan hidup pekerja lajang namun perlu diganti menjadi kebutuhan hidup bagi satu istri dan kedua orang anak.
3. Diharapkan dinas yang berhubungan dengan penentuan Upah Minimum senantiasa mengontrol harga-harga kebutuhan di masyarakat sehingga dapat disesuaikan dengan tingkat upah yang akan diterima oleh pekerja/buruh.